

## **Implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dengan Program Dana Talangan Haji di BMT Mitra Mandiri Jawa Tengah**

### ***Implementation of the 7 Year Special Queue Hajj Bailout Fund Program with the Hajj Bailout Fund Program at BMT Mitra Mandiri Central Java***

**Sulatin Khosiah<sup>a</sup>**

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia  
[sulatinkhosiah07@gmail.com](mailto:sulatinkhosiah07@gmail.com)

**Lin Emy Prastiwi<sup>b</sup>**

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia  
[iinemyprastiwi24@gmail.com](mailto:iinemyprastiwi24@gmail.com)

**Agus Marimin<sup>c</sup>**

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia  
[agus.marimin@gmail.com](mailto:agus.marimin@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun yang diselenggarakan oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Tujuan utama program ini adalah memfasilitasi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi terkendala dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pimpinan dan karyawan BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran hingga pencairan dana cukup sederhana namun terstruktur, melibatkan pendaftaran, persyaratan dokumen, evaluasi kelayakan, dan penandatanganan perjanjian pembiayaan. Calon jamaah harus memenuhi kriteria kelayakan yang meliputi identitas diri, kelayakan kesehatan, dan kemampuan finansial. Manfaat program ini bagi calon jamaah meliputi akses lebih cepat untuk menunaikan haji dan mengatasi beban keuangan. Bagi BMT Mitra Mandiri, program ini memperkuat hubungan dengan masyarakat dan mendukung inklusivitas keuangan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan kuota, persyaratan kelayakan yang ketat, dan peningkatan permintaan layanan. Dari sisi BMT, tantangan meliputi manajemen risiko keuangan dan likuiditas. Implementasi program ini harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan promosi keadilan. Program ini juga memberikan pelatihan manajemen keuangan syariah kepada calon jamaah, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dalam jangka panjang. Kesimpulannya, Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun memberikan manfaat signifikan bagi calon jamaah dan BMT Mitra Mandiri Wonogiri, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci: Implementasi, Program Dana Talangan Haji, Program BMT**

---

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of the Special Hajj Queue Loan Program for 7 Years organized by BMT Mitra Mandiri Wonogiri. The main objective of this program is to facilitate Muslims who wish to perform the hajj but face financial constraints. This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consist of the leadership and employees of BMT. The results show that the mechanism from registration to fund disbursement is quite simple yet structured, involving registration, document requirements, eligibility evaluation, and the signing of a financing agreement. Prospective pilgrims must meet eligibility criteria, including personal identification, health eligibility, and financial capability. The benefits of this program for prospective pilgrims include quicker access to perform hajj and alleviating financial burdens. For BMT Mitra Mandiri, this program strengthens relationships with the community and supports financial inclusivity. However, challenges faced include quota limitations, stringent eligibility requirements, and increased service demand. From BMT's perspective, challenges include financial risk management and liquidity. The implementation of this program must ensure compliance with Sharia principles, such as the prohibition of usury and the promotion of justice. This program also provides Sharia financial management training to prospective pilgrims, enabling them to be financially independent in the long term. In conclusion, the Special Hajj Queue Loan Program for 7 Years offers significant benefits for both prospective pilgrims and BMT Mitra Mandiri Wonogiri, despite facing several challenges in its implementation..*

**Keywords: Implementation, Hajj Loan Program, BMT Program**

**PENDAHULUAN**

Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun adalah inisiatif yang dirancang untuk membantu individu yang ingin menunaikan ibadah haji, namun belum memiliki cukup dana (Faruq & Wahyuni, 2023). Program ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada umat Muslim yang ingin menjalankan ibadah haji dengan memberikan fasilitas talangan dana. Program Haji Khusus Antrian 7 Tahun menciptakan solusi bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dengan melibatkan antrian yang terstruktur. Namun, seperti halnya banyak program, beberapa permasalahan sering muncul yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Kuota haji yang terbatas oleh pemerintah dapat menjadi permasalahan utama. Jika kuota tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari peserta program, banyak orang mungkin harus menunggu lebih lama untuk berangkat haji. Peserta mungkin mengalami kesulitan finansial selama periode antrian 7 tahun, yang dapat mempengaruhi kemampuan calon jamaah haji untuk membayar biaya haji (Solikhah, 2023). Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau perubahan keuangan pribadi peserta dapat menjadi hambatan. Permasalahan yang lain adalah calon jamaah haji kurang memahami secara mendalam mengenai syarat dan ketentuan program, seperti prosedur pembayaran, batas waktu, dan kewajiban peserta selama periode antrian. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Biaya haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi beban finansial yang cukup berat bagi peserta program (Yahya, 2023).

Hal ini dapat mengakibatkan peserta kesulitan untuk mempersiapkan dana yang diperlukan.

Pertumbuhan jumlah jamaah haji yang signifikan dari tahun ke tahun dapat menimbulkan masalah terkait infrastruktur dan akomodasi di tanah suci. Ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan peserta selama pelaksanaan ibadah haji. Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi haji atau program antrian 7 tahun dapat berdampak pada pelaksanaan program (Mulkin et al., 2021). Peserta dan penyelenggara perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Keterlambatan pelunasan biaya haji dari peserta dapat menghambat proses pendaftaran dan persiapan keberangkatan. Hal ini dapat menunda jadwal antrian dan menciptakan ketidakpastian. Fokus program yang terlalu banyak pada aspek teknis dan keuangan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman spiritual dan persiapan mental peserta dalam menjalankan ibadah haji. Proses administratif yang kompleks dan panjang dapat menciptakan hambatan bagi peserta yang tidak terbiasa dengan tata cara administratif atau memiliki kendala birokrasi. Penanggulangan permasalahan-permasalahan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, penyelenggara program, dan peserta. Peningkatan komunikasi, edukasi, serta pengelolaan yang efektif dari pihak penyelenggara dan peserta dapat membantu mengatasi sebagian besar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Haji Khusus Antrian 7 Tahun.

Menurut Rizki et al. (2023) Kebijakan pemberian dana talangan haji biasanya dirancang untuk membantu umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun menghadapi kendala finansial. Kebijakan ini dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, bank, atau badan usaha lainnya yang memiliki fokus pada pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi kebijakan ini harus memperhatikan aspek-aspek etis dan syariah dalam penyelenggaraan pemberian dana talangan haji. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci dalam menjaga integritas program dan kepercayaan calon penerima dana talangan. Beberapa elemen kebijakan yang biasanya terkait dengan pemberian dana talangan haji antara lain adalah persyaratan pendaftaran. Pemberi dana talangan harus menetapkan kriteria kelayakan bagi calon penerima dana talangan, termasuk syarat-syarat seperti identitas diri yang sah, kondisi kesehatan, dan kemampuan finansial. Pemberi dana talangan akan menetapkan besaran maksimal dana talangan yang dapat diberikan kepada setiap calon jamaah haji serta menentukan mekanisme atau formula perhitungan besaran dana talangan, yang dapat bergantung pada pendapatan, kebutuhan hidup, atau faktor-faktor lainnya.

Elemen selanjutnya adalah menetapkan jangka waktu pelunasan dana talangan, baik dalam bentuk angsuran bulanan atau pembayaran lump sum sebelum keberangkatan haji. Kebijakan dana talangan juga sampai pada mekanisme pengembalian dana (Farid, 2019). Pihak pemberi dana talangan akan menentukan mekanisme pengembalian dana talangan, termasuk tingkat bunga (jika ada) atau skema keuntungan bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan dana talangan. Selain itu, pihak pemberi

dana talangan akan menyediakan pilihan bagi penerima dana talangan untuk memilih skema pengembalian yang sesuai dengan kemampuan keuangan calon jamaah haji. Proses pemberian dana talangan haji ini akan membutuhkan agunan atau jaminan. Pihak pemberi dana talangan akan menentukan agunan atau jaminan yang diperlukan dari calon penerima dana talangan dengan beberapa opsi tanpa agunan bagi calon jamaah haji yang mungkin sulit memberikan jaminan keuangan. Prosedur pendaftaran dan prosedur verifikasi dilakukan secara transparan dan cepat untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (Rahayu & Marzuki, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Islam (Jannah et al., 2023). BMT biasanya didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Indonesia, 2023). Tujuan utama BMT adalah memberikan pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Ini mencakup pembiayaan mikro, tabungan syariah, dan layanan keuangan lainnya (Jannah et al., 2023). BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan kegiatan bisnis yang melanggar prinsip-prinsip moral Islam. BMT umumnya memiliki struktur kepemilikan yang bersifat partisipatif. Anggotanya dapat berkontribusi dengan cara menjadi pemilik saham atau memiliki akun tabungan di BMT. BMT menyediakan berbagai jenis layanan keuangan, termasuk pembiayaan mikro (mudharabah, murabahah, musyarakah), tabungan syariah, dan jasa lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tujuan BMT adalah mendorong inklusivitas keuangan dengan menyediakan layanan keuangan kepada mereka yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Indonesia, 2023). Sebagian besar BMT tunduk pada pengawasan dan regulasi yang diberlakukan oleh otoritas keuangan syariah atau pemerintah setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keamanan keuangan. BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BMT merupakan bagian dari perkembangan sistem keuangan syariah yang semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

BMT Mitra Mandiri di Wonogiri, Jawa Tengah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Program yang dimiliki oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri antara lain pembiayaan mikro syariah, tabungan syariah, pendidikan keuangan syariah, dana talangan haji, pembiayaan konsumtif syariah, asuransi syariah, program sosial dan kemanusiaan, pengembangan usaha mikro, keuangan inklusif dan program pengembangan kapasitas masyarakat. Program dana talangan haji antrian 7 tahun sudah berjalan selama 10 tahun di BMT Mitra

Mandiri Wonogiri. Bererapa kendala terkait program dana talangan di BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan haji atau lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan memerlukan penyesuaian strategi, biaya haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi beban finansial yang lebih besar bagi peserta program (Mulkin et al., 2021). Masalah ketiga adalah penyusutan nilai ulang. Dengan berjalannya waktu, nilai uang mengalami penyusutan akibat inflasi. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli dana talangan yang telah diberikan kepada peserta. Permasalahan terakhir yang sering ditemui pada program dana talangan haji di BMT Mitra Mandiri Wonosobo adalah adanya perubahan kondisi ekonomi peserta selama periode antrian 7 tahun bisa mempengaruhi kemampuan calon jamaah haji untuk membayar talangan. Faktor-faktor seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keuangan pribadi dapat menjadi kendala.

Penelitian Rizki et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pemberian dana talangan haji dirancang untuk membantu umat Muslim yang menghadapi kendala finansial dalam menunaikan ibadah haji, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan etis. Penelitian Farid (2019) menunjukkan bahwa elemen-elemen kebijakan ini meliputi persyaratan pendaftaran, kriteria kelayakan, besaran maksimal dana, jangka waktu pelunasan, dan mekanisme pengembalian dana. Penelitian Rahayu & Marzuki (2020) menunjukkan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara transparan dan cepat, serta ada opsi tanpa agunan bagi calon jamaah yang kesulitan memberikan jaminan keuangan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi dalam konteks alami atau setting di mana fenomena tersebut terjadi (Moleong, 2013). Penelitian kualitatif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara terperinci (Sugiyono, 2020). Hal ini termasuk pemahaman mendalam tentang latar belakang, konteks, dan karakteristik subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yang terdiri dari 1 orang Pimpinan BMT Mandiri Wonogiri dan 1 orang karyawan BMT Mandiri Wonogiri. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dengan subjek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari arsip data atau catatan administrasi BMT Mandiri Wonogiri dan kajian literatur dengan variabel yang sama.

Hasil temuan selanjutnya akan dilakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah

proses sistematis yang digunakan untuk menggali makna dari data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian. Ini melibatkan transformasi data kualitatif menjadi temuan, temuan, atau konsep yang bermakna. Penggunaan matriks untuk mengorganisir dan menganalisis data kualitatif (Miles et al., 2014). Matriks memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan di antara berbagai elemen data. Tahapan metode analisis data yang dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pengumpulan data, pemisahan data, penggabungan data, interpretasi data dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dengan Program Dana Talangan Haji di BMT Mitra Mandiri

Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dengan Program Dana Talangan Haji di BMT Mitra Mandiri Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 2 informan penelitian di BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Mekanisme calon jamaah haji untuk mendapatkan dana talangan haji di BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pendaftaran. Calon jamaah haji perlu datang langsung ke kantor BMT Mitra Mandiri Wonogiri untuk melakukan pendaftaran. Pada tahap ini, mereka akan diberikan formulir pendaftaran yang perlu diisi dengan data pribadi dan informasi keuangan. Langkah kedua adalah persyaratan dokumen. Calon jamaah perlu menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri yang sah, bukti pendapatan atau sumber dana, dan dokumen kesehatan yang mungkin diperlukan sebagai salah satu pertimbangan.

Langkah ketiga adalah evaluasi kelayakan. Setelah menerima dokumen, BMT Mitra Mandiri akan melakukan evaluasi kelayakan. Ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan finansial calon jamaah untuk membayar kembali dana talangan dan memastikan bahwa persyaratan lainnya dipenuhi. Langkah keempat adalah penilaian kesehatan. Calon jamaah juga mungkin harus menjalani penilaian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bisa melibatkan pemeriksaan kesehatan fisik dan pemeriksaan medis lainnya untuk memastikan bahwa calon jamaah memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat haji. Langkah kelima adalah penentuan besaran dana talangan. Setelah evaluasi selesai, BMT Mitra Mandiri akan menentukan besaran dana talangan yang dapat diberikan kepada calon jamaah. Besaran ini dapat bergantung pada kondisi keuangan calon jamaah dan skema pembiayaan yang ditawarkan. Langkah keenam adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan dana talangan. Jika calon jamaah memenuhi syarat dan setuju dengan besaran dana talangan yang ditawarkan, mereka akan diminta untuk menandatangani perjanjian pembiayaan atau perjanjian talangan. Perjanjian ini akan

mencakup detail-detail terkait mekanisme pembayaran, tingkat keuntungan (jika ada), dan tanggung jawab calon jamaah.

Setelah perjanjian ditandatangani, langkah selanjutnya adalah BMT Mitra Mandiri akan melakukan pencairan dana talangan sesuai dengan skema yang telah disepakati. Dana ini dapat digunakan oleh calon jamaah untuk membiayai persiapan dan perjalanan haji. Calon jamaah harus mematuhi perjanjian pembayaran yang telah ditetapkan. Mereka akan membayar kembali dana talangan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri atau lembaga keuangan syariah lainnya yang menyelenggarakan program serupa. Penting untuk calon jamaah untuk memahami dengan jelas persyaratan, ketentuan, dan kewajiban yang terkait dengan program dana talangan haji ini sebelum mengajukan permohonan.

Uraian di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2 yang menyatakan bahwa "Prosesnya cukup sederhana. Calon jamaah haji dapat mendaftar di BMT Mitra Mandiri Wonogiri dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana talangan haji. Setelah pendaftaran, pihak BMT akan melakukan verifikasi dokumen dan menilai kelayakan calon penerima. Jika memenuhi syarat, calon jamaah dapat memperoleh dana talangan tersebut." Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan proses yang sederhana namun terstruktur ini, BMT Mitra Mandiri Wonogiri memberikan akses yang mudah dan jelas bagi calon jamaah haji untuk mendapatkan dana talangan haji, memudahkan mereka untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji tanpa beban keuangan yang berlebihan.

Calon jamaah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana talangan haji umumnya memiliki beberapa kriteria yang diwajibkan oleh lembaga keuangan, seperti BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Meskipun persyaratan dapat bervariasi, berikut adalah contoh kriteria umum yang biasanya harus dipenuhi oleh calon jamaah seperti identitas diri, kelayakan kesehatan, kemampuan keuangan, pembayaran talangan, kelengkapan dokumen keuangan, kepatuhan syariah, calon jamaah memahami program dana talangan haji dan bersedia menandatangani perjanjian. Setiap lembaga keuangan syariah mungkin memiliki persyaratan yang sedikit berbeda, tetapi kriteria-kriteria tersebut mencerminkan aspek-aspek umum yang diharapkan dari calon jamaah yang mengajukan dana talangan haji. Calon jamaah diharapkan memenuhi kriteria tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan dana talangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 1 yaitu "Kriteria kelayakan melibatkan beberapa aspek, termasuk kondisi keuangan, kesehatan, dan identitas. Calon jamaah perlu memiliki kemampuan untuk

membayar talangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Juga, mereka harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat berangkat haji."

Kemampuan finansial calon jamaah dalam membayar dana talangan haji adalah kemampuan mereka untuk melunasi kembali dana talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Kemampuan calon jamaah untuk membayar dana talangan secara signifikan terkait dengan pendapatan mereka. Pendapatan yang cukup memberikan jaminan bahwa calon jamaah memiliki sumber dana yang memadai untuk melunasi kembali talangan. Kondisi stabilitas keuangan calon jamaah juga menjadi pertimbangan. Lembaga keuangan akan menilai apakah calon jamaah memiliki stabilitas keuangan yang memadai untuk menghadapi risiko dan memastikan pembayaran talangan dapat dilakukan.

Calon jamaah haji juga harus memiliki kemampuan calon jamaah untuk menabung atau memiliki tabungan yang memadai juga mencerminkan kemampuan finansial mereka. Tabungan dapat menjadi cadangan keuangan yang dapat digunakan untuk melunasi dana talangan. Selain itu, lembaga keuangan akan menilai tingkat utang dan kewajiban keuangan lainnya yang dimiliki oleh calon jamaah. Ini mencakup pembayaran utang yang ada dan kewajiban keuangan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka membayar dana talangan. Kemampuan finansial ini menjadi faktor kunci dalam menentukan kelayakan calon jamaah untuk mendapatkan dana talangan haji. Oleh karena itu, lembaga keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa calon jamaah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan kedua yang menyatakan bahwa "Kriteria utamanya adalah kemampuan finansial calon jamaah. Mereka harus memiliki kestabilan ekonomi yang memadai untuk membayar kembali dana talangan. Selain itu, aspek-aspek lain seperti kesehatan dan kelengkapan dokumen juga menjadi pertimbangan."

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa calon jamaah haji yang memiliki kemampuan finansial yang memadai, terutama dari segi pendapatan, stabilitas keuangan, dan kemampuan menabung, memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi syarat dan mendapatkan dana talangan haji dari lembaga keuangan seperti BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Faktor-faktor seperti pemahaman yang baik tentang skema pembiayaan, jangka waktu pembayaran yang realistis, serta minimnya utang dan kewajiban keuangan lainnya juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian kelayakan calon jamaah. Dengan demikian, kemampuan finansial calon jamaah berperan krusial dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan program dana talangan haji.

Program dana talangan haji antrian 7 tahun yang dibuat oleh BMT Mita Mandiri Wonogiri

memberikan manfaat bagi calon jamaah haji dan BMT Mitra Mandiri WOnogiri sendiri. Manfaat utama bagi calon jamaah haji berupa akses yang lebih cepat untuk menunaikan ibadah haji. Calon jamaah tidak perlu menunggu antrian yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun, sehingga impian untuk berhaji dapat terwujud lebih cepat. Dana talangan haji membantu mengatasi beban keuangan yang mungkin dihadapi oleh calon jamaah. Mereka dapat mempersiapkan perjalanan ibadah haji tanpa harus menanggung beban keuangan yang berlebihan. Program ini mendorong inklusivitas keuangan dengan memberikan kesempatan kepada calon jamaah dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengikuti ibadah haji tanpa terkendala oleh keterbatasan keuangan.

Manfaat program dana talangan haji antrian 7 tahun bagi BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah program ini memperkuat hubungan antara BMT Mitra Mandiri Wonogiri dengan masyarakat setempat. BMT Mitra Mandiri Wonogiri turut mendukung inklusivitas keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada mereka yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Program ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada calon jamaah untuk merencanakan dan melaksanakan ibadah haji dengan lebih mandiri secara finansial.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 1 dan informan 2 yang menyatakan bahwa "Program ini memberikan manfaat besar kepada calon jamaah dengan memberikan akses keuangan yang memungkinkan mereka untuk menunaikan ibadah haji tanpa beban keuangan yang berlebihan. Bagi BMT Mitra Mandiri Wonogiri, program ini juga menjadi peluang untuk memberikan layanan keuangan syariah yang memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan inklusivitas keuangan."

Program Dana Talangan Haji Antrian 7 Tahun memberikan manfaat signifikan bagi calon jamaah dengan memfasilitasi akses yang cepat dan mengurangi beban keuangan. Sementara itu, bagi BMT Mitra Mandiri Wonogiri, program ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga mendukung inklusivitas keuangan dan berperan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas. Dengan demikian, program ini memiliki dampak positif secara sosial dan ekonomi.

### **Implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dalam Sudut Panjang Islam**

Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun merupakan sebuah inisiatif yang berupaya untuk memberikan bantuan kepada calon jamaah haji yang belum dapat berangkat dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sudut pandang keuangan Islam, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip yang melarang riba (bunga), mempromosikan keadilan, dan mendorong solidaritas antara umat Muslim. Implementasi program ini harus memastikan bahwa semua transaksi terbebas dari riba, baik dalam pengumpulan dana maupun dalam pemberian talangan kepada

calon jamaah haji. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam distribusi dana, sehingga mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.

Sumber dana untuk program ini dapat berasal dari sumbangan sukarela dari umat Muslim atau melalui investasi syariah yang halal. Penting bagi pengelola program untuk menjaga transparansi dalam proses pengumpulan dana, sehingga para penyumbang dan masyarakat umum dapat memahami penggunaan dan alokasi dana tersebut. Selain itu, kriteria yang jelas harus ditetapkan untuk menentukan siapa yang berhak menerima talangan haji, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, usia, dan latar belakang sosial.

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memberikan talangan kepada calon jamaah haji yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Talangan ini dapat digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara terbuka dan transparan kepada para penyumbang dan masyarakat umum, sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Selain memberikan talangan, program ini juga dapat mencakup aspek pendidikan keuangan dan kemandirian. Para penerima talangan dapat diberikan pelatihan tentang manajemen keuangan Islam, pengelolaan tabungan, dan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjadi mandiri secara finansial dalam jangka panjang. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah juga dapat membantu dalam pengelolaan dana, investasi, dan memberikan saran tentang aspek-aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka nilai-nilai Islam, memberikan manfaat yang besar bagi umat Muslim yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji namun mengalami kendala finansial.

Peluang dan Tantangan Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dengan Program Dana Talangan Haji di BMT Mitra Mandiri

Program dana talangan haji antrian 7 tahun dalam pelaksanaannya memiliki tantangan atau hambatan. Tantangan atau hambatan dari sisi jamaah yang terbesar adalah keterbatasan kuota. Jika program dana talangan haji memiliki kuota yang terbatas, calon jamaah mungkin menghadapi kesulitan untuk memperoleh talangan jika permintaan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Persyaratan kelayakan yang ketat, baik dari segi keuangan maupun kesehatan, dapat menjadi hambatan bagi calon jamaah yang tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Ini dapat mengakibatkan penolakan permohonan talangan.

Calon jamaah mungkin menghadapi tantangan jika informasi terkait program, persyaratan, atau proses aplikasi tidak cukup tersebar luas. Kurangnya pemahaman tentang program dapat menghambat partisipasi calon jamaah. Jika tingkat permintaan terlalu tinggi, BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat menghadapi kesulitan dalam memproses sejumlah besar permohonan. Hal ini dapat memperlambat proses verifikasi dan pencairan dana.

Tantangan atau Hambatan dari Sisi BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah tingkat likuiditas, manajemen risiko keuangan, peningkatan permintaan layanan, dan pemantauan serta pengawasan. BMT Mitra Mandiri Wonogiri mengalami keterbatasan likuiditas, BMT akan menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan talangan haji yang tinggi. Ini dapat mempengaruhi kemampuan BMT untuk memberikan dana talangan secara optimal. Program dana talangan haji membawa risiko keuangan, terutama jika terjadi ketidakmampuan calon jamaah untuk membayar kembali dana talangan. BMT perlu memiliki mekanisme manajemen risiko yang baik untuk mengurangi potensi kerugian.

Suksesnya program ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan lainnya yang disediakan oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Mereka perlu memastikan infrastruktur dan kapasitas layanan mereka dapat menangani lonjakan permintaan. BMT perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana talangan agar tidak disalahgunakan. Ini memerlukan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Pemahaman mendalam terhadap tantangan ini dapat membantu BMT Mitra Mandiri Wonogiri untuk mengimplementasikan program dana talangan haji dengan lebih efektif, sambil menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam penyelenggaraan program.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 1 yang menyatakan bahwa "Beberapa tantangan yang kami hadapi melibatkan keterbatasan dana yang tersedia untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari calon jamaah. Selain itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan program ini, karena beberapa calon jamaah mungkin kurang akrab dengan konsep dana talangan haji." Informan 2 menyatakan bahwa "Salah satu tantangan yang kami alami adalah kesulitan dalam mengelola tingginya permintaan. Jumlah calon jamaah yang ingin mendapatkan dana talangan terus meningkat, dan kami harus memastikan kelancaran proses verifikasi dan pencairan dana. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terkait program ini masih perlu ditingkatkan."

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program dana talangan haji Antrian 7 Tahun yang diselenggarakan oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri memiliki dampak positif dalam memfasilitasi calon jamaah haji. Namun, seiring dengan kesuksesan program, muncul beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh BMT untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam

penyelenggaraan program. Tantangan utama melibatkan keterbatasan dana, peningkatan permintaan yang signifikan, dan tingkat pemahaman masyarakat terkait program.

Keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat dari calon jamaah. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep dana talangan haji menjadi langkah krusial untuk mengatasi kurangnya kefamiliaran beberapa calon jamaah dengan program ini. Dalam mengelola tingginya permintaan, BMT Mitra Mandiri Wonogiri perlu memastikan infrastruktur dan kapasitas layanan mereka dapat menangani peningkatan volume transaksi.

Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana talangan menjadi aspek penting untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan pemahaman mendalam terhadap tantangan ini, BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program, menjaga keberlanjutan keuangan, dan meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah. Kesenambungan program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sambil tetap memastikan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraannya.

Proses pendaftaran dan permohonan calon jamaah haji di BMT Mandiri Wonogiri merupakan tahapan awal yang krusial dalam mekanisme perolehan dana talangan haji. Informan memberikan penjelasan rinci tentang berbagai langkah yang harus diikuti oleh calon jamaah untuk memanfaatkan program ini secara efektif. Tahapan mekanisme perolehan dana talangan haji di BMT Mandiri Wonogiri, menunjukkan transparansi dan rinciannya dalam memberikan akses kepada calon jamaah untuk mewujudkan impian mereka dalam menunaikan ibadah haji. Seluruh proses perolehan dana talangan haji di BMT Mandiri Wonogiri dilakukan dengan prinsip integritas dan perhatian mendalam terhadap kebutuhan serta kemampuan finansial calon jamaah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Utari et al. (2023) bahwa setiap tahap proses, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan dana, disusun dengan transparansi. Calon jamaah diberikan informasi rinci mengenai setiap langkah, persyaratan, dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kelayakan. Proses tersebut dirancang untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Tidak ada diskriminasi, dan setiap calon jamaah memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan dan memanfaatkan program dana talangan. Evaluasi kelayakan dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa calon jamaah yang diberikan dana talangan benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan finansial yang memadai. Ini melibatkan penilaian objektif terhadap aspek-aspek tertentu, termasuk kepatuhan syariah dan kelayakan secara umum.

Perjanjian yang ditandatangani antara BMT dan calon jamaah menyajikan rincian dengan jelas terkait pembayaran, syarat-syarat, dan tanggung jawab calon jamaah. Hal ini memastikan bahwa kedua

belah pihak memiliki pemahaman yang sama dan setuju dengan semua ketentuan yang telah disepakati (Amsari, 2021). BMT melakukan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana talangan oleh calon jamaah. Ini melibatkan pelacakan yang cermat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Proses ini mencerminkan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan calon jamaah. BMT Mandiri Wonogiri berupaya memahami situasi dan kebutuhan finansial masing-masing calon jamaah untuk memberikan solusi yang sesuai. Dengan menggabungkan integritas, transparansi, dan perhatian terhadap kebutuhan calon jamaah, BMT Mandiri Wonogiri memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji tanpa beban keuangan yang berlebihan. Pendekatan ini juga mendukung prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan program dana talangan haji.

Calon jamaah yang bermaksud mendapatkan dana talangan haji dari BMT memulai permohonan dengan melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan secara resmi. Pada tahap awal ini, mereka diharapkan mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk identitas diri yang sah dan sertifikat kesehatan yang mencerminkan kelayakan fisik untuk menjalani ibadah haji. Langkah selanjutnya adalah proses verifikasi dokumen (Faruq & Wahyuni, 2023). BMT melakukan penelitian menyeluruh terhadap dokumen yang diserahkan oleh calon jamaah untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Hal ini mencakup pengecekan terhadap identitas diri, sertifikat kesehatan, dan dokumen keuangan yang menjadi landasan evaluasi kelayakan.

Proses evaluasi kelayakan merupakan langkah krusial dalam menentukan apakah calon jamaah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemampuan finansial calon jamaah, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan kelayakan secara umum untuk menerima dana talangan. Setelah melewati evaluasi kelayakan, BMT menentukan besaran dana talangan yang akan diberikan kepada calon jamaah. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan finansial calon jamaah dan kapasitas BMT untuk memberikan dukungan.

Calon jamaah yang dinyatakan layak menerima dana talangan kemudian melakukan tandatangan perjanjian dengan BMT. Perjanjian ini mencakup rincian terkait pembayaran, syarat-syarat, dan tanggung jawab calon jamaah selama menggunakan dana talangan (Utari et al., 2023). Selanjutnya, terjadi pencairan dana talangan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dana tersebut dapat digunakan oleh calon jamaah untuk memenuhi berbagai kebutuhan terkait persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Proses terakhir adalah pelunasan dana talangan setelah calon jamaah kembali dari ibadah haji. Calon jamaah berkewajiban melunasi dana talangan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, sehingga program dapat berlanjut dengan baik untuk membantu calon jamaah berikutnya.

Melalui serangkaian tahapan ini, BMT menjalankan proses perolehan dana talangan haji dengan teliti, transparan, dan memperhatikan kebutuhan serta kemampuan finansial calon jamaah, sehingga mewujudkan akses yang adil dan berkeadilan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji. Proses perolehan dana talangan haji di BMT Mandiri Wonogiri dijalankan dengan teliti, transparan, dan memperhatikan kebutuhan serta kemampuan finansial calon jamaah. Ini menciptakan akses yang adil dan berkeadilan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tahapan mekanisme perolehan dana talangan haji di BMT Mandiri Wonogiri menunjukkan tingkat transparansi dan rincian yang memadai.
- b. Calon jamaah haji yang memiliki kemampuan finansial yang memadai, terutama dari segi pendapatan, stabilitas keuangan, dan kemampuan menabung, memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi syarat dan mendapatkan dana talangan haji dari lembaga keuangan seperti BMT Mitra Mandiri Wonogiri.
- c. Program dana talangan haji Antrian 7 Tahun yang diselenggarakan oleh BMT Mitra Mandiri Wonogiri memiliki dampak positif dalam memfasilitasi calon jamaah haji.
- d. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan keterbatasan dana, peningkatan permintaan yang signifikan, dan tingkat pemahaman masyarakat terkait program.

### **Saran**

Saran dalam penelitian ini mencakup diharapkan bagi BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat menjadi evaluasi pelaksanaan program dana talangan haji antrian 7 tahun sehingga program tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi lanjutan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Ekonomi Islam*, 12(1), 98–117. <https://doi.org/10.22236/jei.v12i1.7005>

- Farid, R. (2019). Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 107–120. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.758>
- Faruq, M. Al, & Wahyuni, N. (2023). Implementasi PSAK No. 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah. *Ekuitas (Ekonomi, Keuangan, Investasi, Dan Syariah)*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>
- Indonesia, D. I. (2023). Inovasi BMT: Sosial Dan Komersial Bisnis Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *INVESTAMA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 1–14.
- Jannah, S., Putrib, S. U., & Asma. (2023). Mekanisme Pembiayaan Syariah pada Baitul Māl wat Tamwil (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 130–149. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1050>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. . (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mulkin, F. I., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708–721.
- Rahayu, D., & Marzuki, I. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. *KITABAH*, 4(1).
- Rizki, M., Siregar, A., & Syam, S. (2023). Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 di Tinjau dari Siyasah Maliyah. *Uns Law Review*, 6(1), 2934–2945.
- Solikhah. (2023). Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Utari, L. P., Isa, M., Nasution, A. M., & Nofinawati. (2023). Strategi Pemasaran Dana Talangan Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. *Journal Of Sharia Banking*, 128–135. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jsbanking>
- Yahya, A. (2023). Kredit Biaya Haji Dan Umrah Dalam Hukum Islam. *Deflasi Jurnal Ekonomi*, 2(2), 1–14..